



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.12.6 /Kep. 366 -Diskominfo/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN MANAJEMEN DATA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, maka diperlukan pengelolaan manajemen data yang handal untuk melakukan akselerasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan peningkatan kualitas Manajemen Data untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai ketentuan Pasal 36 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan pedoman pelaksanaan Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pedoman Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 12, Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 96).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pedoman Manajemen Data, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Manajemen Data sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman proses perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan data di dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping curve followed by a smaller, more complex mark.

WAHYU MIJAYA

Tembusan :

Yth, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 500.12.6 /Kep. 366 -Diskominfo/2024
TANGGAL : 31 Juli 2024
TENTANG : PENETAPAN PEDOMAN MANAJEMEN DATA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

MANAJEMEN DATA

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi pemerintah memberikan peluang untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Penerapan SPBE akan mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Momentum pengembangan SPBE telah dimulai sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government dimana menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah diinstruksikan untuk melaksanakan pengembangan SPBE sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan kapasitas sumberdaya yang dimiliki. Sejalan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon telah melaksanakan penerapan SPBE dalam penyelenggaraan pemerintah. Namun demikian, penerapan SPBE lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon masih menemui kendala, salah satunya dalam penerapan manajemen data.

Data merupakan substansi penting dalam proses pembangunan, termasuk dalam proses penyelenggaraan SPBE. Data menjadi dasar dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah yang menentukan apakah suatu kebijakan tepat atau justru sebaliknya. Permasalahannya, meskipun data tersedia di semua instansi, namun kenyataannya data sulit dicari. Kalaupun datanya tersedia, belum tentu data tersebut akurat dan *up to date*. Hal ini yang menyebabkan sulitnya menentukan kebijakan yang tepat.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengamanahkan bahwa untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional perlu dilakukan manajemen data. Hal ini sejalan dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa tujuan Satu Data Indonesia adalah untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Berdasarkan kedua Perpres tersebut, tata kelola atau manajemen data adalah hal mendasar yang menjadi pijakan awal dalam proses penyusunan kebijakan pemerintah. Manajemen data itu sendiri merupakan proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.

Tata kelola data di Kabupaten Cirebon mengacu pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 56 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Cirebon. Dalam Peraturan Bupati tersebut mengatur mekanisme perencanaan, pengumpulan dan penyebarluasan data. Untuk mengatur manajemen data SPBE lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon agar dihasilkan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses, diperlukan manajemen data SPBE yang harus dilaksanakan seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mencapai tujuan SPBE.

1.2. Maksud dan Tujuan

Manajemen Data dimaksudkan untuk mengatur tata kelola data yang tersistem dan terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai bentuk implementasi penyelenggaraan Tata Kelola SPBE Tingkat Kabupaten Cirebon. Adapun tujuan dari Manajemen Data tersebut adalah menyediakan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

1.3. Sasaran

Manajemen Data dilaksanakan dengan sasaran sebagai berikut:

- 1) Tersedianya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
- 2) Terwujudnya penerapan SPBE di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- 3) Meningkatnya kinerja pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

1.4. Ruang Lingkup Manajemen Data

Manajemen Data merupakan serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data. Perencanaan Manajemen Data tertuang pada Peta Rencana SPBE lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon. Ruang lingkup manajemen data adalah sebagai berikut:

- 1) Arsitektur Data
- 2) Data Induk dan Data Referensi
- 3) Basis Data
- 4) Kualitas Data

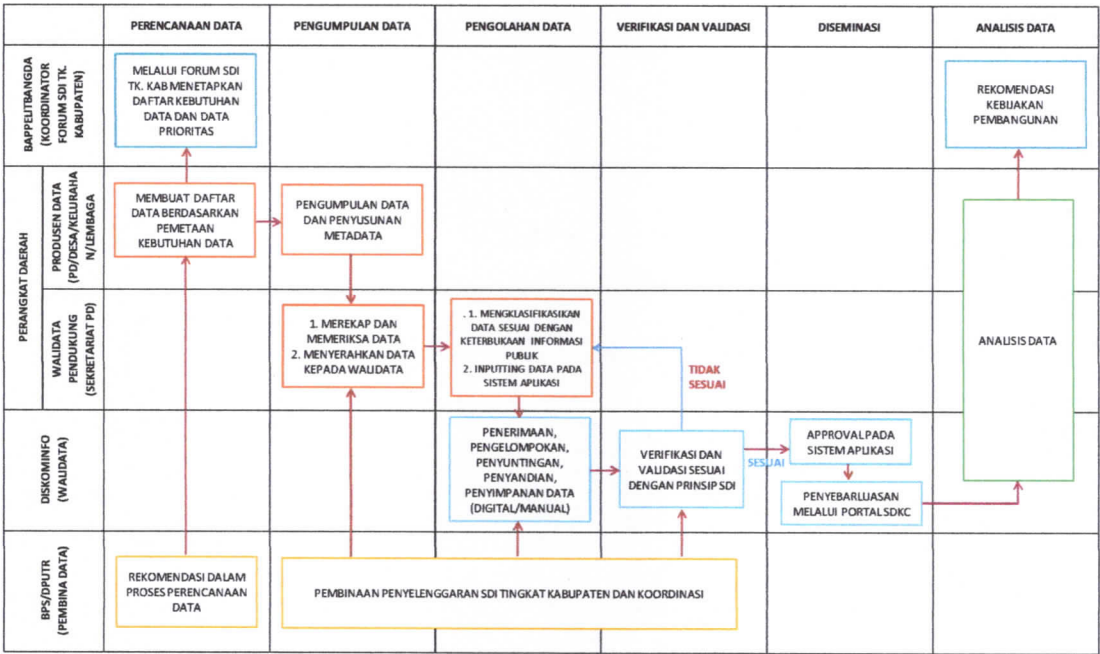
BAB II

MANAJEMEN ARSITEKTUR DATA

Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data SPBE, Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam SPBE. Manajemen Arsitektur Data adalah rangkaian proses untuk menetapkan dan menyebarluaskan komponen Arsitektur Data. Komponen utama dalam manajemen arsitektur data yaitu meliputi Spesifikasi Data dan Ketentuan Data. Spesifikasi Data terdiri atas format dan struktur baku untuk Data Induk dan Data Referensi, sedangkan Ketentuan Data mencakup tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan spesifikasi data.

Tujuan Manajemen Arsitektur Data adalah untuk: (1) Menyediakan data yang berkualitas tinggi; (2) Mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan data; serta (3) Merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan data saat ini dan kebutuhan data jangka panjang. Manajemen Arsitektur Data SPBE Tingkat Daerah juga sebagai perwujudan dari penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah. Dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Cirebon mengatur mekanisme perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.

Alur tata kelola data di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Tata Kelola Data Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon
(Sesuai Perbup No. 56 Tahun 2022 tentang Satu Data
Kabupaten Cirebon)

Dalam tata kelola data di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon terdiri dari 6 tahapan, yaitu perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data. Masing-masing tahapan tersebut tidak lepas dari peran setiap penyelenggara Satu Data Kabupaten Cirebon.

a. Perencanaan Data

Perencanaan data dilakukan untuk memenuhi kebutuhan data dan menghindari duplikasi data serta sebagai acuan dalam pelaksanaan pengumpulan data. Dalam proses perencanaan data, setiap Produsen Data (Perangkat Daerah/Desa/Kelurahan/Lembaga Lainnya) membuat daftar data sebagai kebutuhan data daerah. Daftar data dibuat berdasarkan pemetaan kebutuhan data pemerintah daerah, arahan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Cirebon. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon (Bappelitbangda) sebagai Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten menetapkan Daftar Kebutuhan Data dan Data Prioritas melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Kriteria data yang dikategorikan ke dalam Data Prioritas adalah sebagai berikut:

- 1) Mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Bupati/Gubernur yang tertuang dalam RPJMD;
- 2) Mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
- 3) Memenuhi kebutuhan program, kegiatan dan kebijakan yang mendesak.

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 048/Kep.266-diskominfo/2022. Susunan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon terdiri dari: (1) Dewan Pengarah, (2) Pembina Data, (3) Walidata, (4) Walidata Pendukung Teknis, (5) Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data, dan (6) Produsen Data. Tugas Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Cirebon;
- 2) Merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten Cirebon;
- 3) Mengidentifikasi dan mengelola daftar data untuk sistem pengelolaan data terpadu, serta menetapkan kewenangan dan tanggung jawab untuk menerbitkan data agar dapat digunakan secara maksimal dan manfaatnya dapat disebarluaskan;
- 4) Menyusun rencana aksi tahunan Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten Cirebon;
- 5) Menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Cirebon;

- 6) Membahas dan menentukan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya serta Daftar Data Prioritas;
- 7) Menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten Cirebon secara berkala kepada Bupati.

Daftar data yang dibuat oleh Perangkat Daerah memuat produsen data untuk masing-masing data, satuan, cara pengumpulan data, pengkategorian prioritas atau non prioritas, untuk kebutuhan apa data tersebut dan apakah data boleh dipublikasi kepada umum atau hanya internal Pemerintah Daerah. Selanjutnya daftar data tersebut diserahkan kepada Walidata (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon) dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati. Adapun format daftar data pada setiap Perangkat Daerah adalah seperti tercantum dalam **Tabel 1**.

Tabel 1. Format Isian Daftar Data Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

No	Elemen Data	Frekuensi	Level Estimasi	Prioritas/ Non Prioritas	Cara Pengumpulan Data	Kebutuhan	Publikasi (Internal Pembab/Umum)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Dalam kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, data yang dikumpulkan oleh setiap Perangkat Daerah menjadi dasar penetapan kebijakan perencanaan anggaran. Hal ini dimaksudkan agar pengumpulan data oleh Perangkat Daerah berjalan tepat waktu dan diperbaharui secara terus menerus. Daftar Data Prioritas setiap Perangkat Daerah harus dimasukkan ke dalam capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Cirebon tentang Satu Data Kabupaten Cirebon.

b. Pengumpulan Data

Setelah Daftar Data dibuat oleh masing-masing Perangkat Daerah, selanjutnya Perangkat Daerah melakukan pengumpulan data dan penyusunan metadatanya. Walidata Pendukung yang berkedudukan di setiap Perangkat Daerah merekap dan memeriksa data, mengklasifikasikan data sesuai dengan keterbukaan informasi publik, selanjutnya menyerahkan data kepada Walidata, baik melalui *inputting* data ke dalam sistem aplikasi maupun secara manual.

Dari setiap Daftar Data yang telah ditetapkan, harus disusun metadatanya. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi. Metadata mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan

manajemen file/data tersebut dalam suatu basis data. Setiap data yang dikumpulkan wajib ada metadatanya. Manfaat metadata adalah sebagai berikut:

- ✓ **Pembina Data:** menjadi alat bagi pengukuran tingkat kematangan penyelenggaraan statistik. Dengan adanya ukuran tersebut, pembina data dapat menentukan program pembinaan statistik yang tepat sasaran sesuai dengan tingkat kebutuhan;
- ✓ **Produsen Data:** menghindari duplikasi kegiatan, meningkatkan efisiensi anggaran, peningkatan nilai organisasi karena tatakelola informasi yang baik, memudahkan seluruh unsur pimpinan dalam memahami indikator kinerjanya, dan menjaga kesinambungan data pada saat pergantian pengelola kegiatan/data;
- ✓ **Walidata:** memudahkan dalam memahami dan mengelola data dan informasi sebagai investasi organisasi, dokumentasi tahapan pengolahan data, pengendalian mutu, definisi, penggunaan data, keterbatasan, dan sebagainya, serta mencegah kesalahan dalam penyampaian data;
- ✓ **Pengguna Data:** dapat memudahkan dalam memahami data, mencegah kesalahan penggunaan dan interpretasi data, serta menjamin ketepatan dalam pemanfaatan data.

Metadata terdiri dari 3 jenis dengan masing-masing format yang berbeda, yaitu (1) Metadata Kegiatan Statistik; (2) Metadata Variabel; dan (3) Metadata Indikator. Formulir metadata mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik seperti tercantum dalam **Lampiran 1**. Penjelasan masing-masing jenis metadata tersebut adalah sebagai berikut:

- **Metadata Kegiatan**

Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional. Kegiatan statistik ini bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir guna mendukung pembangunan nasional. Data statistik dapat diinterpretasikan dengan benar dan tepat jika karakteristik atau atribut dari data tersebut didefinisikan dalam bentuk metadata statistik. Metadata kegiatan adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik.

Tabel 2. Struktur Baku Metadata Kegiatan Statistik

No	Struktur Metadata Kegiatan
1	Nama kegiatan statistik
2	Identifikasi penyelenggara
3	Tujuan pelaksanaan
4	Periode pelaksanaan

5	Cakupan Wilayah
6	Rancangan pengumpulan data/metodologi
7	Rancangan pengolahan data
8	Level estimasi
9	Analisis

- **Metadata Variabel**

Variabel didefinisikan sebagai konsep yang dapat diukur dan memiliki variasi hasil pengukuran. Variabel statistik merupakan variabel yang digunakan pada kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga. Setiap variabel memiliki konsep dan definisi yang perlu dipahami terlebih dahulu sebelum menggunakan variabel tersebut. Data yang dikumpulkan dari variabel-variabel kegiatan statistik akan menghasilkan angka-angka statistik maupun indikator. Variabel didefinisikan sebagai konsep yang dapat diukur dan memiliki variasi hasil pengukuran. Variabel statistik merupakan variabel yang digunakan pada kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga.

Tabel 3. Struktur Baku Metadata Variabel

No	Struktur Metadata Variabel
1	Kode Kegiatan
2	Nama Variabel
3	Alias
4	Konsep
5	Definisi
6	Referensi Pemilihan
7	Referensi Waktu
8	Tipe Data
9	Domain Value
10	Kalimat Pertanyaan
11	Apakah Variabel dapat Diakses Umum

- **Metadata Indikator**

Metadata indikator adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator, interpretasi terhadap suatu indikator, varibel pembentuk indikator, rumus yang digunakan dalam metode penghitungan indikator, dan informasi lain yang perlu untuk diketahui dalam upaya memberikan pemahaman yang tepat dalam menggunakan nilai indikator yang dihasilkan.

Tabel 4. Struktur Baku Metadata Indikator

No	Struktur Metadata Indikator
1	Nama Indikator
2	Konsep
3	Definisi
4	Interpretasi
5	Metode/Rumus Penghitungan
6	Ukuran
7	Satuan
8	Klasifikasi
9	Publikasi ketersediaan indikator pembangun
10	Nama Indikator Pembangun
11	Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun
12	Nama Variabel Pembangun
13	Level Estimasi
14	Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Penyusunan metadata dilakukan oleh Produsen Data, dengan pendampingan dari Dinas Komunikasi dan Informatika serta Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Pendampingan penyusunan metadata dilakukan secara bertahap, diawali dengan sosialisasi tentang metadata, desk penyusunan metadata pertama dan kedua, serta desk ketiga jika diperlukan. Selain itu juga dilakukan rapat koordinasi dalam penyusunan metadata statistik sektoral.

Dalam proses pengumpulan data statistik sektoral, terdapat 4 cara yaitu: (1) Sensus; (2) Survei; (3) Kompilasi produk administrasi; dan (4) Cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Untuk pengumpulan data dengan metode survei, baik dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lain wajib melaporkan kegiatan statistik tersebut kepada BPS. Selanjutnya BPS akan memberikan rekomendasi yang menyatakan kegiatan tersebut layak atau tidak untuk dilanjutkan. Tata cara pemberian rekomendasi pada kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh pemerintah mengacu pada Panduan Rekomendasi Kegiatan Statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dengan nomor katalog 1303019.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, penyelenggara survei statistik sektoral wajib memberitahukan rencana penyelenggaraan surveinya kepada BPS, mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS, dan menyerahkan hasil

penyelenggaraan survei yang dilakukannya kepada BPS. Pemberitahuan rancangan penyelenggaraan survei statistik sektoral kepada BPS dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan statistik tidak terjadi duplikasi penyelenggaraan survei dan hasil kegiatan statistik sektoral tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal serta dalam rangka menyusun metadata statistik sektoral yang dapat diakses oleh semua pihak.

Penyampaian pemberitahuan penyelenggaraan survei statistik sektoral dilakukan dengan menggunakan kuesioner FS3 yang dapat diperoleh dari kantor BPS terdekat ataupun dengan mengakses website Sistem Informasi Rujukan Statistik BPS dengan alamat <http://sirusa.bps.go.id>. Kuesioner FS3 terdapat dalam **Lampiran 2**.

- Pengolahan Data

Walidata melakukan pengolahan data baik melalui sistem ataupun manual dengan tahapan: (1) Penerimaan; (2) Pengelompokan; (3) Penyuntingan, (4) Penyandian; dan (5) Perekaman/penyimpanan data. Selanjutnya data diverifikasi dan validasi oleh Walidata sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia, yaitu Standar Data, Metadata, Kode Referensi dan Interoperabilitas. Apabila data tidak sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia, maka dikembalikan kepada Perangkat Daerah yang mengumpulkan data tersebut untuk diperbaiki sesuai hasil pemeriksaan. Apabila data tersebut sudah sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia, maka Walidata melakukan *approval* pada Sistem Aplikasi dan penyebarluasan melalui Portal Open Data Kabupaten Cirebon dalam website cirebonkab.go.id.

Data Prioritas yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data juga diperiksa oleh Walidata, dan diperiksa kembali oleh Pembina Data. Hasil pemeriksaan Pembina Data, disampaikan oleh Walidata kepada Pembina Data. Apabila tidak sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, maka dikembalikan kepada Produsen Data untuk diperbaiki.

Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data dikelompokkan per sektor, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. Pengelompokan Data per Sektor

No	Sektor	Perangkat Daerah
1	Sosial Budaya	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial 4. BPBD 5. Dinas Ketenagakerjaan 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

		8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9. Dinas Pemuda dan Olah Raga 10. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 11. Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan
2	Ekonomi	1. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2. Dinas Pertanian 3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Fisik/Infrastruktur	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Perhubungan
4	Pemerintahan	1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat Dewan 3. Inspektorat 4. Dinas Komunikasi dan Informatika 5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 6. Badan Keuangan dan Aset Daerah 7. Badan Pendapatan Daerah 8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 10. Satuan Polisi Pamong Praja

- Analisis Data

Walidata dan Produsen Data melakukan analisis data untuk bahan rekomendasi kebijakan pembangunan. Analisis data ini dilakukan secara mandiri maupun dengan melibatkan pakar/ahli. Selanjutnya hasil analisis data dapat dimanfaatkan oleh Bappelitbangda dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah. Analisis data juga dilakukan dalam bentuk infografis agar lebih memudahkan pengguna data dalam memahami informasi dan hasil analisis yang disajikan.

- Penyebarluasan Data

Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data. Penyebarluasan data dilakukan oleh

Walidata melalui portal Open Data Kabupaten Cirebon dalam website cirebonkab.go.id. Selain melalui sistem aplikasi, penyebaran data juga dilakukan melalui media cetak dan media elektronik lainnya dengan memperhatikan kerahasiaan, privasi, keamanan dan Hak Kekayaan Intelektual. Data yang disebarluaskan adalah data yang statusnya informasi terbuka.

BAB III

MANAJEMEN DATA INDUK DAN DATA REFERENSI

Manajemen Data Induk dan Data Referensi dilaksanakan untuk menyediakan data yang: (a) sesuai struktur dan format baku yang ditentukan; (b) dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan; serta (c) menghindari duplikasi. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia. Sementara itu, data referensi adalah komponen yang mendiskripsikan substansi data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai data, serta mengintegrasikannya dengan domain arsitektur SPBE yang lain. Dalam data referensi terdapat Kode Referensi, yaitu tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perencanaan Data Induk dan Data Referensi dilaksanakan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat berdasarkan: (a) Daftar Data; (b) Usulan Pembina Data; dan (c) Arahan Dewan Pengarah Satu Data Indonesia. Pengumpulan Data Induk dan Data Referensi dilakukan oleh Walidata dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. Pemeriksaan Data Induk dan Data Referensi dilakukan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat untuk memastikan: (a) Kesesuaian dengan struktur dan format baku; (b) Kesesuaian dengan Daftar Data tahun berikutnya; dan (c) Tidak terjadi duplikasi.

Data Induk dan Data Referensi disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. Data Induk dan Data Referensi yang telah disepakati disampaikan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia kepada Dewan Pengarah Satu Data Indonesia. Selanjutnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menetapkan Data Induk dan Data Referensi yang telah disepakati. Penyebarluasan Data Induk dan Data Referensi dilakukan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia. Pembaruan Data Induk dan Data Referensi diperbarui sesuai kebutuhan. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat mengoordinasikan pembaruan Data Induk dan Data Referensi dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi dilaksanakan selaras dengan perumusan dan penyepakatan Kode Referensi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat merumuskan kebijakan teknis dalam rangka penyelarasan manajemen Data Induk dan Data Referensi dengan Kode Referensi.

Di tingkat daerah, Walidata Tingkat Daerah telah menyusun Data Induk dan Data Referensi sesuai dengan tugas dan kewenangan setiap Perangkat Daerah. Dari identifikasi dan inventaris data yang telah dilakukan, selanjutnya dibuat Daftar Data seperti tercantum dalam **Lampiran 3**. Bersama dengan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon sebagai Koordinator Forum Satu Data Tingkat Daerah dan BPS Kabupaten Cirebon sebagai Pembina Data Tingkat Daerah, telah disepakati Data Prioritas Pembangunan Daerah. Penentuan Data Prioritas didasarkan pada: (a) Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); (b) Standar Pelayanan Minimal (SPM); (c) Indikator Kinerja dalam RPJMD; (d) Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan (e) Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah.

Data Prioritas ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 6. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan
1.	Persentase penambahan budaya daerah yang dilestarikan	Persen
2.	Jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yang aktif	Kelompok
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin
4.	Rata-rata Lama Sekolah(RLS)	Tahun
5.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun
6.	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun
7.	Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan	Persen
8.	Tingkat pengangguran terbuka	Prosen
9.	PDRB Per Kapita	Juta Rp
10.	Persentase Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani di Kabupaten Cirebon	Persen
11.	Rasio Kesempatan Kerja	Persen
12.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin
13.	Prosentase Penyelesaian Friksi/Gesekan antar Umat Beragama	Persen
14.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Prosen
15.	Indeks Gini	Poin
16.	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Ribu Rupiah/Kapita /Tahun
17.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Prosen
18.	Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	Prosen
19.	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Prosen
20.	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Prosen
21.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin
22.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Poin
23.	Indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap (baik)	Poin
24.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Poin
25.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks
26.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin
27.	Indeks kemandirian fiskal daerah	Prosen
28.	Nilai SAKIP	Poin
29.	Opini BPK terhadap LKPD	WTP
30.	Indeks <i>Monitoring Center for Prevention</i> (MCP)	Poin
31.	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Poin
32.	Jumlah desa mandiri	Desa
33.	Indeks Ketertiban dan Ketenteraman	Persen
34.	Jumlah pelanggaran Perda	Kasus
35.	Indek resiko bencana	Poin

Tabel 7. Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (Dampak/Impact) Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumus	Satuan
1	2	3	4
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
	FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI		
1	Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan	(PDRB pada tahun berkenaan – PDRB tahun sebelumnya)/ PDRB tahun sebelumnya X 100%	Persen
2	Laju inflasi	Perubahan nilai inflasi dari nilai tahun sebelumnya	Persen
3	PDRB per kapita		
	a. PDRB per kapita ADHB	PDRB ADHB/ jumlah Penduduk	Juta Rupiah
	b. PDRB per kapita ADHK	PDRB ADHK/ jumlah Penduduk	Juta Rupiah
4	Indeks Gini	Tingkat kesenjangan pendapatan yang dihitung melalui variabel total pendapatan dan total pengeluaran per penduduk	Poin
5	Prosentase penduduk miskin	Jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan/total jumlah penduduk X 100%	Persen
6	Indeks keparahan kemiskinan	Ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin	Persen
7	Indeks kedalaman kemiskinan	Rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan	Persen
	FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL		
8	IPM	(Indeks Kesehatanx Indeks Pendidikanx Indeks Pengeluaran) ^{1/3} x 100	Poin
9	Angka Melek Huruf	Jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang bisa baca tulis/ jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas x 100%	Persen
10	Angka rata-rata Lama Sekolah	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal yang dihitung melalui variabel partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang pernah diduduki, kelas yang sedang dijalani, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan	Tahun
11	Umur Harapan Hidup (UHH)	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh sejak lahir yang dihitung melalui variabel anak lahir hidup dan anak masih hidup	Tahun
12	Persentase Balita Gizi Buruk	Jumlah balita gizi buruk / jumlah balita X 100%	%
13	Prevalensi balita gizi kurang	Jumlah balita gizi kurang / jumlah balita X 100%	%
14	Cakupan desa siaga aktif	Jumlah desa siaga aktif / jumlah desa siaga yang dibentuk X 100%	%

Tabel 8. Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan
Tingkat Program (Outcome)
Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024

Kode	ASPEK/ URUSAN/ PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	SKPD
1	2	3	11
	ASPEK PELAYANAN UMUM		
	URUSAN PEMERINTAHAN 1 WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka partisipasi kasar	DINAS PENDIDIKAN
		Angka partisipasi kasar SD	DINAS PENDIDIKAN
		Peningkatan Persentase Masyarakat Melek Aksara	DINAS PENDIDIKAN
		Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV jenjang SD	DINAS PENDIDIKAN
		Angka Melek Huruf Al Qur'an jenjang SD	DINAS PENDIDIKAN
		Angka Melek Huruf Al Qur'an SMP	DINAS PENDIDIKAN
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik PAUD/TK	DINAS PENDIDIKAN
		Peningkatan Capaian Angka Lulusan Kesetaraan Paket A setara SD	DINAS PENDIDIKAN
		Angka partisipasi kasar SMP	DINAS PENDIDIKAN
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah PAUD/TK	DINAS PENDIDIKAN
		Peningkatan Capaian Angka Kelulusan Warga Belajar Paket B setara SMP	DINAS PENDIDIKAN
		Standar Pelayanan Minimal	DINAS PENDIDIKAN
		Peningkatan Angka Lulusan pada jenjang Kesetaraan Paket C Setara SMA	DINAS PENDIDIKAN
		Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts	DINAS PENDIDIKAN
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatnya Angka Lulusan SMP	DINAS PENDIDIKAN
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik SD	DINAS PENDIDIKAN
		Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah : Kondisi Keadaan Ruang Kelas Baik SMP	DINAS PENDIDIKAN
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SD	DINAS PENDIDIKAN
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SMP	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Angka partisipasi kasar	DINAS PENDIDIKAN
		Peningkatan Capaian Angka Lulusan Kesetaraan Paket A setara SD	DINAS PENDIDIKAN
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	DINAS PENDIDIKAN
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SD	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV jenjang SD	DINAS PENDIDIKAN
		Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah	DINAS PENDIDIKAN

Lanjutan Tabel 8.

Kode	ASPEK/ URUSAN/ PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	SKPD
1	2	3	11
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian ibu (AKI)	DINAS KESEHATAN
		Angka kematian Bayi (AKB)	DINAS KESEHATAN
		Tercapainya Universal Health Coverage (UHC)	DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya Status Gizi Balita	DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit	DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya jumlah Desa Open Defecation Free (ODF)	DINAS KESEHATAN
1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk	DINAS KESEHATAN
1.02.04.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase TPM/TPP yang memenuhi syarat kesehatan	DINAS KESEHATAN
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah tangga ber PHBS	DINAS KESEHATAN
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase Berkurangnya luasan genangan akibat banjir	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tinggal bersanitasi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.09.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	persentase pemenuhan dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Terpeliharanya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi Baik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Prosentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Tersusunnya Informasi Database Jalan dan Jembatan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	persentase meningkatnya tertib penyelenggaraan jasa kontruksi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemenuhan dokumen rencana rinci tata ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase ketaatan pemanfaatan ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan jumlah sambungan Rumah Air Minum	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan jumlah sambungan Rumah Air Limbah	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Prosentase Bangunan dan Gedung Yang Memiliki Sertifikat Laik Fungsi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Rasio bangunan berIMB per satuan Bangunan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Lanjutan Tabel 8.

Kode	ASPEK/ URUSAN/ PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	SKPD
1	2	3	11
1.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN		
1.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Lingkungan Permukiman yang tertata	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Prosentase Perencanaan Pembangunan Perumahan yng sesuai dengan NSPK	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.03.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase Lingkungan Permukiman Kumuh	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.04.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Prosentase Lingkungan Permukiman Kumuh	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rasio Pemukiman Layak Huni	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yg didukung dengan PSU	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.06.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio Permukiman Layak Huni	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
2.10.04.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	prosentase penyelesaian konflik pertanahan di Kabupaten Cirebon	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.05.	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Prosentase kepemilikan tanah pemerintah daerah tertata dengan baik	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.06.	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.09.	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Tersedianya tanah untuk masyarakat	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.10.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Penyelesaian izin lokasi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase peningkatan pemberantasan Peredaran Barang Kena Cukai ilegal	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Porsentase pelayanan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dilaksanakan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Porsentase pemenuhan tenaga satuan perlindungan masyarakat	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Porsentase peningkatan Jumlah lokasi rawan Penyakit Masyarakat (Pekat) yang ditertibkan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Prosentase jumlah pelanggaran ketertiban dan ketentraman masyarakat yang terselesaikan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penurunan Jumlah Kebakaran = Jumlah kebakaran yang tertangani/jumlah total kebakaran X 100%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Lanjutan Tabel 8.

Kode	ASPEK/ URUSAN/ PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	SKPD
1	2	3	11
1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1.06.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	DINAS SOSIAL
		Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	DINAS SOSIAL
		Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan	DINAS SOSIAL
1.06.03.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	DINAS SOSIAL
1.06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Terehabilitasi	DINAS SOSIAL
1.06.05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin yang Menerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINAS SOSIAL
1.06.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dapat melaksanakan fungsi sosialnya	DINAS SOSIAL
		Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan	DINAS SOSIAL
1.06.07.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Taman Makam Pahlawan	DINAS SOSIAL
		Terpeliharanya di Lingkungan Taman Makam Pahlawan	DINAS SOSIAL
	URUSAN PEMERINTAHAN 2 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
2.07.02.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Prosentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Berdasarkan Dokumen PTK : Tingkat Akurasi Indikator PTK	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.03.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi	DINAS KETENAGAKERJAAN
		Tersajinya Dokumen	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.04.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Prosentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) propinsi	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.05.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Prosentase Perusahaan Yang Mendapatkan Tata Kelola Yang Layak	DINAS KETENAGAKERJAAN
3.32.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
3.32.03.	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	bertambahnya wilayah tujuan transmigrasi	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
2.09.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase LPM yang dimandirikan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.09.03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan terhadap jumlah kebutuhan pangan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
		Persentase kelompok pangan yang terkendali harganya	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
		Tingkat Keanekaragaman Konsumsi Pangan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.09.04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Berkurangnya daerah rawan pangan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.09.05.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase PSAT aman dikonsumsi	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Lanjutan Tabel 8.

Kode	ASPEK/ URUSAN/ PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	SKPD
1	2	3	11
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3.25.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.25.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
		Jumlah Produksi Pembenihan Ikan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.25.05.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.25.06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Pengolahan hasil Perikanan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
		Jumlah Konsumsi Ikan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.02.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase Tutupan Lahan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya keanekaragaman hayati	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan di bidang lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kegiatan peduli lingkungan yang dilakukan masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya partisipasi masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya pelayanan penanganan pengaduan masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase Cakupan Pelayanan pengelolaan sampah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Prosentase Timbulan Sampah yang Terkurangi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Lanjutan Tabel 8.

Kode	ASPEK/ URUSAN/ PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	SKPD
1	2	3	11
2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN		
2.12.02.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Jumlah Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan lengkap (Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik / KTP El)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Prosentase jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon yang sudah melaksanakan perekaman KTP El	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Prosentase Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Akta Kelahiran	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Prosentase pemenuhan pelayanan Akta-akta pencatatan sipil	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Jumlah OPD dan Desa yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Peningkatan kualitas Database Kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Update Penyediaan Data Profil Kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN		
2.13.02.	PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Meningkatnya jumlah desa yg melakukan kerja sama dalam proses pembangunan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN		
2.08.02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga / Kelompok berbasis gender yang mendapatkan penguatan	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Proporsi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Lanjutan Tabel 8.

Kode	ASPEK/ URUSAN/ PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	SKPD
1	2	3	11
2.08.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Prosentase perempuan yang mendapat perlindungan	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya ketahanan keluarga yang ditandai dengan menurunnya angka perceraian	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pelaksanaan pengumpulan data terpilah gender	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Presentase anak yang mendapat perlindungan	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jumlah layanan korban kekerasan	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN		
2.14.02.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	tersediannya informasi data keluarga	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase jumlah Apseptor MKJP	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase masyarakat dalam Keikutsertaan ber- KB	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Meningkatnya jumlah pendidik/ Motivator sebaya	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Lanjutan Tabel 8.

Kode	ASPEK/ URUSAN/ PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	SKPD
1	2	3	11
		Pembinaan Kampung KB (Keluarga Berkualitas) dengan ditandai peningkatan status	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Tingkat Kesehatan Reproduksi Remaja	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan anggota Bina Keluarga (BKB/BKR/BKL) ber-KB	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
2.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)	DINAS PERHUBUNGAN
		Rasio sarana dan Prasarana Pengujian yang layak	DINAS PERHUBUNGAN
		Prosentase jumlah pelanggaran lalu lintas	DINAS PERHUBUNGAN
		Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan (Halte dan Terminal) yang layak fungsi	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase ketersediaan sarana dan Prasarana Pengamanan Lalu Lintas yang berfungsi dengan baik	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase kepemilikan KIR/Wajib Uji angkutan Umum	DINAS PERHUBUNGAN
		Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria).	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya prosentase pemenuhan Perijinan	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Presentasi Perijinan landasan	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.05.	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Prosentasi ijin pintu perlintasan kereta api di kabupaten	DINAS PERHUBUNGAN
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2.16.02.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks aspek teknologi informasi dan komunikasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Cakupan pengelolaan aplikasi informatika	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Lanjutan Tabel 8.

Kode	ASPEK / URUSAN / PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	SKPD
1	2	3	11
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
2.20.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase dokumen hasil pengolahan dan analisis statistik sektoral yang dihasilkan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase ketersediaan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Cirebon	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
2.21.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Tingkat keamanan informasi pemerintah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN		
2.17.02.	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Terciptanya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.03.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Terciptanya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Prosentase koperasi yang meningkat predikat Tingkat Kesehatan hasil pengawasan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.04.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentasi Koperasi Sehat	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATHAN PERKOPERASIAN	Prosentase pengurus, pengawas, manajer dan pengelola koperasi yang bersertifikat kompetensi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.06.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Laju perkembangan usaha produktif koperasi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Berkembang Nilai Produksinya/ Omsetnya	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
2.18.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Jenis Pelayanan Perizinan Berbasis Online	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Jenis Pelayanan Perizinan Yang Sudah Dilimpahkan dan Efektif Dilaksanakan di Kecamatan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Rata-Rata Lama Perizinan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Jumlah Tenaga Kerja Lokal Yang Terserap	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Tenaga Kerja Lokal Yang Terserap	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rata-Rata Lama Perizinan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Lanjutan Tabel 8.

Kode	ASPEK/ URUSAN/ PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	SKPD
1	2	3	11
2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2.19.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Prosentase daya saing Kepemudaan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan olahraga	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Prosentase pemuda yang aktif dalam kepramukaan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
2.22.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase pertumbuhan pelaku budaya	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prosentase pertumbuhan jumlah sanggar kesenian tradisional	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.04.	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cerita Sejarah yang di Seminarkan	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.05.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penambahan penetapan cagar budaya	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.06.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Bertambahnya koleksi museum	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
3.26.02.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah obyek daya tarik wisata dengan pertumbuhan kunjungan diatas 10%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.03.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Market Share Kunjungan Pariwisata Kabupaten Cirebon Terhadap Kunjungan Provinsi Jawa Barat	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah HKI ekonomi kreatif	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandarisasi/bersertifikat	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
2.23.02.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Prosentase Peningkatan Perpustakaan Desa yang aktif	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Prosentase peningkatan minat dan budaya baca masyarakat	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Prosentase Perpustakaan SMPN sesuai standar Nasional Perpustakaan	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.03.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Prosentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Lanjutan Tabel 8.

Kode	ASPEK/ URUSAN/ PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	SKPD
1	2	3	11
2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
2.24.02.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Prosentase peningkatan SKPD yang menerapkan sistem administrasi kearsipan secara baku	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Prosentase peningkatan khasanah arsip daerah	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Meningkatnya durasi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Prosentase SKPD yang Tata kelola arsipnya sesuai NSPK	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Prosentase ketersediaan arsip yang terlindungi dan terselamatkan	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.04.	PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP	Prosentase peningkatan SKPD yang menerapkan sistem administrasi kearsipan secara baku	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Prosentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
3.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan (Beras)	DINAS PERTANIAN
		Jumlah Produksi Sektor Peternakan (Sapi Potong, Ayam Ras, Unggas Lokal dan Domba)	DINAS PERTANIAN
		Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan (Gula dan Kelapa)	DINAS PERTANIAN
		Jumlah Populasi Ternak	DINAS PERTANIAN
		Jumlah Produksi Komoditas Hortikultura (Bawang Merah, Cabai Besar dan Mangga)	DINAS PERTANIAN
		Rasio Ketersediaan Sarana Produksi Pertanian	DINAS PERTANIAN
3.27.03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan (Beras)	DINAS PERTANIAN
		Jumlah Produksi Sektor Peternakan (Sapi Potong, Ayam Ras, Unggas Lokal dan Domba)	DINAS PERTANIAN
		Jumlah Produksi Komoditas Hortikultura (Bawang Merah, Cabai Besar dan Mangga)	DINAS PERTANIAN
		Rasio Ketersediaan Prasarana Produksi Pertanian	DINAS PERTANIAN
3.27.04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase Penurunan Frekuensi Kemunculan Penyakit Zoonosis	DINAS PERTANIAN
		Kejadian/Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (Satuan Ternak)	DINAS PERTANIAN
3.27.05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan (Beras)	DINAS PERTANIAN
		Rasio Tingkat Keberhasilan Penanggulangan Bencana Pertanian per-tahun	DINAS PERTANIAN
3.27.06.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Produksi Komoditas Hortikultura (Bawang Merah, Cabai Besar dan Mangga)	DINAS PERTANIAN
		Rasio Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian	DINAS PERTANIAN
3.27.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase Kelompok Petani Yang Naik Kelas	DINAS PERTANIAN
		Prosentase Penyuluh Yang Lulus Pelatihan Berbasis Kompetensi	DINAS PERTANIAN
		Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar	DINAS PERTANIAN
3.30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
3.30.03.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan bina pengelola pasar	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Penerimaan Retribusi Pasar	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Jumlah sarana distribusi perdagangan yang sesuai SNI (Pasar Pemda)	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Lanjutan Tabel 8.

Kode	ASPEK/ URUSAN/ PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	SKPD
1	2	3	11
3.30.04.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pencapaian Stabilitas harga 9 komoditas kebutuhan pokok masyarakat (daging sapi, beras, gula pasir, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, kedelai, tepung terigu, dan bawang merah)	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Koefisien varian antar waktu kebutuhan pokok dan barang penting	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor ke luar Negeri	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.06.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan UTP yang ditera	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Penerimaan Retribusi Tera	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.07.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Nilai perdagangan dalam negeri	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
3.31.02.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan cluster industri	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Jumlah produk IKM yang bersertifikasi	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Jumlah sentra industri yang dikembangkan	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Persentase Pencapaian Sasasaran Pembangunan Industri termasuk turunan pembangunan industri dalam RPIK	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.31.04.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jenis Penerapan Teknologi Industri	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Persentase data perusahaan industri menengah dan perusahaan Kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri Kecil, Menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01.	PERENCANAAN		
5.01.02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	prosentase ketersediaan data perencanaan pembangunan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Penjabaran Konsistensi Program RFJMD kedalam RKPD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		prosentase jumlah dokumen Evaluasi Pembangunan Kabupaten Cirebon	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Meningkatnya SKPD dalam menetapkan IKU dan Perkin	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Prosentase peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Lanjutan Tabel 8.

Kode	ASPEK/ URUSAN/ PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	SKPD
1	2	3	11
5.01.03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase pencapaian kinerja perencanaan pembangunan bidang fispra	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Jumlah rekomendasi kebijakan, hasil kajian dari hasil perencanaan bidang pemerintahan dan sosial budaya yang harus dilaksanakan oleh SKPD terkait	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan perangkat daerah lingkup koordinasi bidang ekonomi yang memenuhi target	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Prosentase capaian kinerja program perangkat daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Prosentase rata rata pencapaian Target kinerja outcome program pada Perangkat Daerah lingkup koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5.05.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Prosentase hasil penelitian pemerintahan, sosial, ekonomi dan pembangunan yang diimplementasikan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Prosentase inovasi dan kreativitas daerah yang diaplikasikan (diterapkan)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.02.02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Peningkatan Pengembangan Wilayah untuk mengurangi dampak resiko bencana, kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pembangunan	PPKD
5.02.	KEUANGAN		
5.02.02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan dan barang daerah	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup APBD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup Perubahan APBD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan serta penyajian laporan aset tetap	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Peningkatan barang milik daerah yang telah dan atau dalam proses sertifikasi serta terinventarisir dan termanfaatkan dengan baik/benar	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup APBD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Peningkatan Penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang sudah Terinventarisasi, Teridentifikasi dan Terdokumentasi dengan Baik dan Benar	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan serta penyajian laporan aset tetap	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan dan barang daerah	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatkan penerimaan pajak daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Lanjutan Tabel 8.

Kode	ASPEK/ URUSAN/ PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	SKPD
1	2	3	11
5.03.	KEPEGAWAIAN		
5.03.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Aparatur yang difasilitasi kesejahteraannya	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Berbasis Sistem	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Persentase Sumber Daya Aparatur Yang ditingkatkan Kompetensinya	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Prosentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Persentase pegawai yang ditempatkan di bidangnya	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Persentase Aparatur yang ditingkatkan integritasnya	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
5.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang ditingkatkan Kompetensinya	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6.01.	INSPEKTORAT DAERAH		
6.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	INSPEKTORAT
6.01.03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	INSPEKTORAT
		Meningkatnya Kapabilitas APIP	INSPEKTORAT
		persentase peningkatan SDM Pengawas berkompeten	INSPEKTORAT
4.02.	SEKRETARIAT DPRD		
4.02.02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Prosentase jumlah raperda yang dibahas dan ditetapkan tepat waktu	SEKRETARIAT DPRD
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase Kerjasama yang ditandatangani	SEKRETARIAT DAERAH
		Prosentase batas wilayah administrasi antar desa dan Daerah yang Ditetapkan	SEKRETARIAT DAERAH
		Prosentase fasilitasi pengelolaan kekayaan desa	SEKRETARIAT DAERAH
		Prosentase Produk Hukum/Informasi Hukum yang di publikasikan pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	SEKRETARIAT DAERAH
		Prosentase Koordinasi yang Dilakukan Di Bagian Kesejahteraan Rakyat	SEKRETARIAT DAERAH
		Prosentase Monev yang Dilakukan Bagian Kesejahteraan Rakyat	SEKRETARIAT DAERAH
		Prosentase Tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan	SEKRETARIAT DAERAH
		Prosentase Pelayanan Fasilitasi Kewenangan Terhadap Kepala/Wakil Kepala Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
		Prosentase Kualitas Kehidupan Keagamaan Yang Ditingkatkan	SEKRETARIAT DAERAH
		Prosentase Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan	SEKRETARIAT DAERAH
		Prosentase Peningkatan Kegiatan Bina Kewilayahan yang Dilakukan	SEKRETARIAT DAERAH
		Prosentase Peraturan Perundang - undangan yang ditetapkan	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berkualitas	SEKRETARIAT DAERAH
		Prosentase Koordinasi yang Dilakukan Bagian Sumber Daya Alam	SEKRETARIAT DAERAH
		Prosentase Keberhasilan Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
		Prosentase kebijakan Pembangunan Daerah yang Dilaksanakan	SEKRETARIAT DAERAH
		Prosentase Koordinasi dalam Meningkatkan Perekonomian	SEKRETARIAT DAERAH

Tabel 9. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs

INDIKATOR TPB
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.
Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.
Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.
Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.
Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.
Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.
Pendampingan psikososial korban bencana sosial.
Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB= Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)
Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.
Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.
Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.
Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).
Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.
Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.
Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.
Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.
Prevalensi anemia pada ibu hamil.
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.
Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.
Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).
Angka Kematian Ibu (AKI).
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.
Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.

Lanjutan Tabel 9.

INDIKATOR TPB
Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.
Prevalensi HIV pada populasi dewasa.
Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.
Kejadian Malaria per 1000 orang.
Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.
Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.
Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).
Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.
Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis
Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.
Prevalensi tekanan darah tinggi.
Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.
Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.
Prevalensi penyalahgunaan narkoba.
Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.
Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.
Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
Total Fertility Rate (TFR).
Unmet need pelayanan kesehatan.
Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Proporsi kematian akibat keracunan.
Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.
Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.
Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.
Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.
Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.
Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.
Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.
Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).
Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.
Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.
Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.

Lanjutan Tabel 9.

INDIKATOR TPB
Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.
Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.
Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.
Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.
Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.
Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).
Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.
Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.
Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.
Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).
Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.
Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.
Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.
Kualitas air danau.
Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.
Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.
Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.
Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.
Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.
Bauran energi terbarukan.
Intensitas energi primer.
Laju pertumbuhan PDB per kapita.
PDB per kapita.
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.
Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.
Persentase tenaga kerja formal.
Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.
Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.
Upah rata-rata per jam pekerja.
Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.
Tingkat setengah pengangguran.
Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).
Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.
Jumlah wisatawan mancanegara.
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.
Jumlah devisa sektor pariwisata.
Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.

Lanjutan Tabel 9.

INDIKATOR TPB
Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.
Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.
Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.
Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.
Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.
Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).
Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.
Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.
Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.
Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).
Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.
Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.
Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.
Kualitas air danau.
Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.
Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.
Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.
Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.
Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.
Bauran energi terbarukan.
Intensitas energi primer.
Laju pertumbuhan PDB per kapita.
PDB per kapita.
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.
Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.
Persentase tenaga kerja formal.
Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.
Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.
Upah rata-rata per jam pekerja.
Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.
Tingkat setengah pengangguran.
Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).
Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.
Jumlah wisatawan mancanegara.
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.
Jumlah devisa sektor pariwisata.
Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.

Lanjutan Tabel 9.

INDIKATOR TPB
Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa
Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).
Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.
Panjang pembangunan jalan tol.
Panjang jalur kereta api.
Jumlah dermaga penyeberangan.
Jumlah pelabuhan strategis.
Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.
Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.
Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.
Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.
Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.
Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.
Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.
Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam
Proporsi individu yang menggunakan internet
Koefisien Gini.
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.
Jumlah desa tertinggal.
Jumlah Desa Mandiri.
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.
Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.
Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.
Indeks Kebebasan Sipil.
Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.
Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).
Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).
Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.
Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.
Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).
Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.
Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
Persentase sampah perkotaan yang tertangani.
Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.
Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.
Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).
Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.
Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.
Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.
Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.
Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.

Lanjutan Tabel 9.

INDIKATOR TPB
Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.
Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.
Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.
Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.
Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.
Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.
Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.
Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.
Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.
Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.
Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).
Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.
Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.
Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).
Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.
Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.
Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.
Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.
Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.
Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.
Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.
Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.
Proporsi penduduk terlayani mobile broadband
Proporsi individu yang menggunakan internet.
Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.
Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.
Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.
Jumlah metadada kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).
Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.
Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.
Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).

Dari penetapan indikator tersebut di atas, diidentifikasi menjadi Daftar Data yang harus dikumpulkan oleh semua Produsen Data (**Lampiran 3**). Selanjutnya data yang dihasilkan dikategorikan per sektor dan dibuatkan metadatanya. Untuk keperluan *uploading* dalam portal Open Data Kabupaten Cirebon, dibuatkan *template* tabel dengan mengacu pada ketentuan Standar Data yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

BAB IV

MANAJEMEN BASIS DATA

Manajemen Basis Data dilaksanakan untuk menyediakan Basis Data yang:

- (a) Menjamin penyimpanan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan di Pusat Data Nasional;
- (b) Menjamin ketersediaan akses Data yang terus menerus; dan
- (c) Menjaga keamanan Data dari akses yang tidak sesuai ketentuan tata kelola Data atau peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Data.

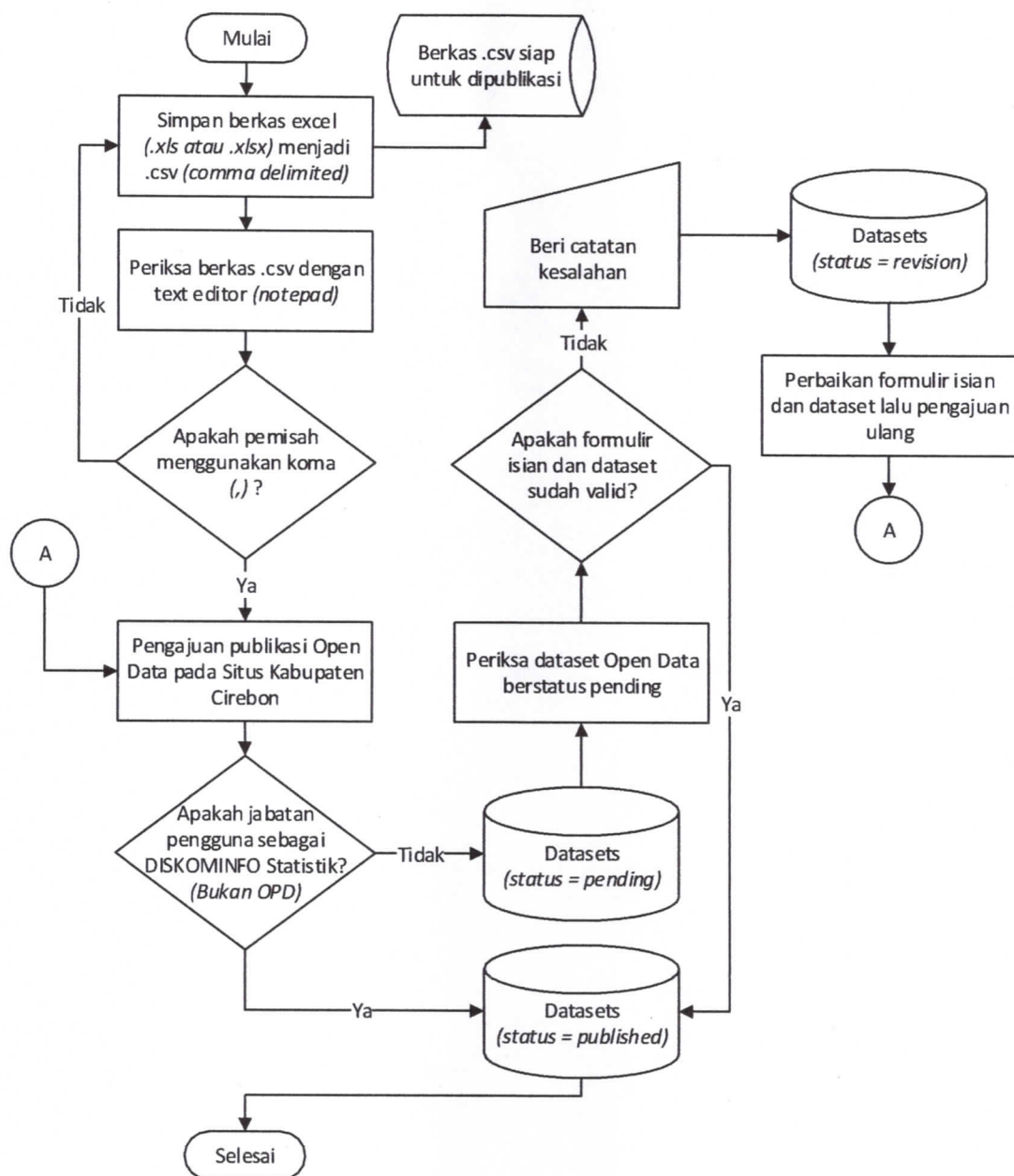
Kegiatan Manajemen Basis Data mencakup:

- (a) Mendefinisikan kebutuhan Walidata dan Produsen Data untuk Basis Data;
- (b) Mengelola Basis Data di Pusat Data Nasional;
- (c) Melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- (d) Menyebarluaskan Basis Data melalui Portal Satu Data Indonesia;
- (e) Membuat cadangan dan distribusi Basis Data; dan
- (f) Merencanakan dan mengelola perbaruan Basis Data.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon mempunyai Data Center yang terpusat di Kantor Diskominfo Kabupaten Cirebon, terdiri dari 63 server dalam 18 rak, UPS berjumlah 5 unit dan firewall 4 unit. Kapasitas data center yaitu Rockmount 25 unit 42U dan Bandwidth 2 GB/S. Terdapat perangkat lunak penyebarluasan data (WMS) dan Perangkat lunak penyebarluasan metadata (CSW). Selain server Diskominfo, dalam Data Center juga terdapat beberapa server milik Perangkat Daerah lainnya untuk keperluan penyimpanan database masing-masing Perangkat Daerah.

Manajemen database yang dilakukan terdiri dari data statistik sektoral dan geospasial. Untuk data statistik sektoral, pengelolaan data menggunakan aplikasi Open Data dalam website Cirebonkab dengan server tersimpan dalam Data Center Diskominfo, sedangkan data geospasial menggunakan aplikasi <http://cirebonkab.ina-sdi.or.id> yang terkoneksi di geoportal nasional di <https://tanahair.indonesia.go.id/portal-web/>.

Manajemen basis data statistik sektoral dalam aplikasi Open Data Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:




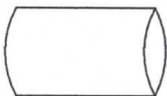
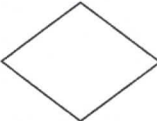


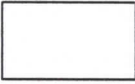
Gambar 2. Flow Chart Manajemen Basis Data Statistik Sektoral dalam Open Data Kabupaten Cirebon

Penjelasan:

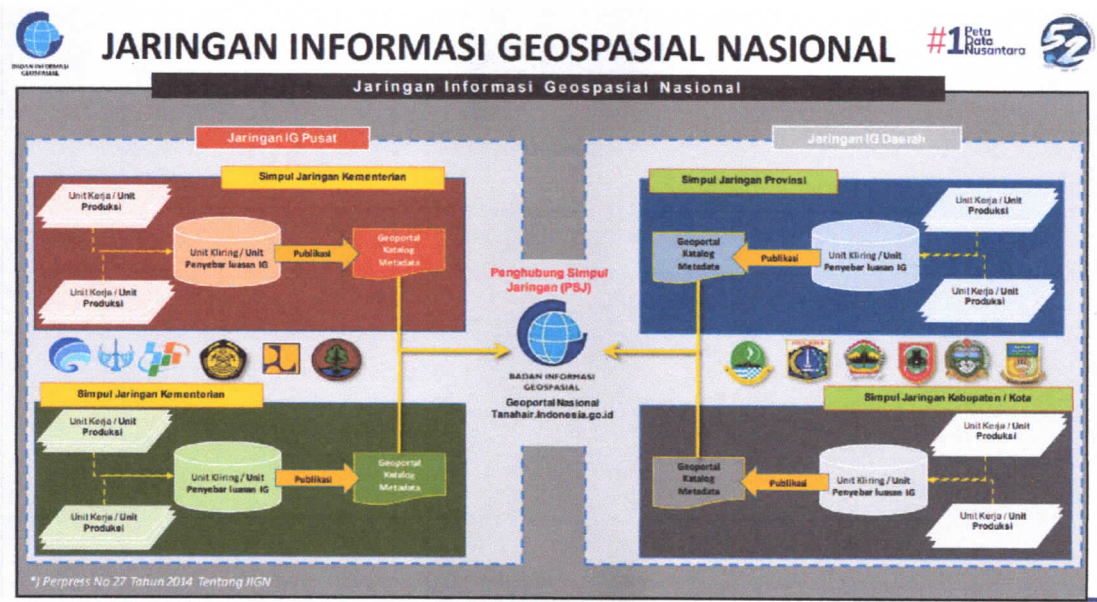
1. Mulai
2. Proses: Simpan berkas excel (.xls atau .xlsx) menjadi .csv (comma delimited)
 - a. Penyimpanan: Berkas .csv siap untuk dipublikasi
3. Proses: Periksa berkas .csv dengan text editor (notepad)
4. Keputusan: Apakah pemisah menggunakan koma (,) ?
 - a. Ya: Lanjut ke nomor 5
 - b. Tidak: Kembali ke nomor 2
5. Proses: Pengajuan publikasi Open Data pada Situs Kabupaten Cirebon
6. Keputusan: Apakah jabatan pengguna sebagai DISKOMINFO Statistik? (Bukan OPD)
 - a. Ya:
 - i. Basis Data: Datasets (status = published)
 - ii. Lanjut ke nomor 9
 - b. Tidak:
 - i. Basis Data: Datasets (status = pending)
 - ii. Lanjut ke nomor 7
7. Proses: Periksa dataset Open Data berstatus pending

8. Keputusan: Apakah formulir isian dan dataset sudah valid?
 - a. Ya:
 - i. Basis Data: Datasets (status = published)
 - ii. Lanjut ke nomor 9
 - b. Tidak:
 - i. Masukkan Manual: Beri catatan kesalahan
 - ii. Basis Data: Datasets (status = revision)
 - iii. Proses: Perbaiki formulir isian dan dataset lalu pengajuan ulang
 - iv. Kembali ke nomor 5
9. Selesai

Penjelasan diagram flowchart yang digunakan:

Diagram	Nama
	Terminator (Mulai - Selesai)
	Hard Disk (Penyimpanan)
	Decision (Keputusan)
	Manual Input (Masukkan Manual)
	Database (Basis Data)
	Process (Proses)

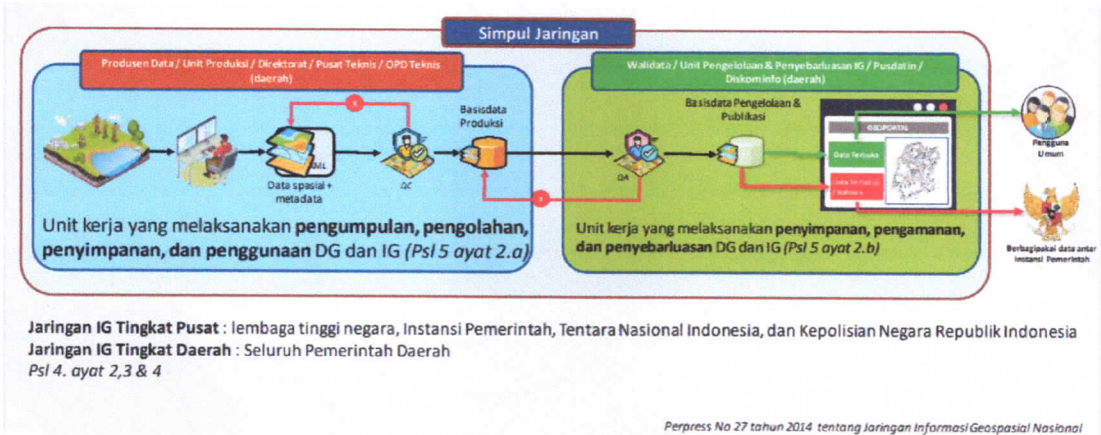
Manajemen basis data geospasial dalam aplikasi geoportal yang dikembangkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Jaringan Informasi Geospasial Nasional

Jaringan informasi geospasial pusat dan daerah akan terhubung dalam geoportal nasional yang dikembangkan oleh BIG. Jaringan Informasi Geospasial Pusat dikoordinasikan dan dikelola melalui Simpul Jaringan Kementerian dan Jaringan Informasi Geospasial Daerah dikoordinasikan dan dikelola melalui Simpul Jaringan Provinsi dan Simpul Jaringan Kabupaten. Di Kabupaten Cirebon, pengelola simpul jaringan daerah adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Alur kerja simpul jaringan adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Alur Kerja Simpul Jaringan

BAB V

MANAJEMEN KUALITAS DATA

Manajemen Kualitas Data dilaksanakan untuk menjamin Data yang dihasilkan Produsen Data yang: (a) Memenuhi prinsip Satu Data Indonesia; dan (b) Diperbarui sesuai dengan jadwal pemutakhiran data. Kegiatan Manajemen Kualitas Data melingkupi kegiatan untuk: (a) Mengembangkan dan mempromosikan kesadaran kualitas Data; (b) Menentukan persyaratan kualitas Data; (c) Menetapkan profil, analisis, dan nilai kualitas Data; (d) Menentukan matriks kualitas Data; (e) Menentukan aturan bisnis kualitas Data; (f) Menguji dan memvalidasi persyaratan kualitas Data; (g) Menetapkan dan mengevaluasi tingkat layanan kualitas Data; dan (h) Mengukur dan memantau kualitas Data secara berkelanjutan.

Manajemen kualitas data di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama di level Produsen Data, dimana setiap Perangkat Daerah memeriksa data yang dikumpulkan sebelum diserahkan ke Walidata atau sebelum *inputting* data ke aplikasi Open Data. Tahap kedua di level Walidata, dimana Walidata memeriksa data yang dikirim oleh Produsen Data sesuai Prinsip Satu Data Indonesia. Jika data yang dikirimkan atau diinput oleh Produsen Data sudah sesuai dengan Prinsip Satu Data, maka akan dilakukan approval ke dalam aplikasi Open Data. Sebaliknya, jika tidak sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia, maka data akan ditolak dan dikembalikan kepada Produsen Data untuk diperbaiki.

Untuk meningkatkan kualitas data, Diskominfo juga melakukan standar data dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan standar data yang dikeluarkan oleh Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIRIBON
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sunan Drajat No.15 Telp. (0231) 8330580

email : diskominfo@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
Tanggal : 11 Juli 2024
Nomor : 500.12.6/762/SPeGov
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Tentang Penetapan
Pedoman Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pemerintah Kabupaten Cirebon.

10/24
g

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka percepatan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Cirebon sebagai tindak lanjut amanat Perpres No 132 tahun 2022 tentang SPBE dan Peraturan Bupati No 96 Tahun 2022 tentang SPBE yang juga merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Bupati.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon telah menyusun Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Pedoman Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Cirebon.

Selanjutnya, mohon kiranya Bapak berkenan untuk menandatangani Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud. Demikian atas perhatian dan berkenaan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon,



BAMBANG SUDARYANTO, SH.,MH.

Pembina Tk. I

NIP. 19781024 200604 1 015

Tembusan :
Yth. Pj. Bupati Cirebon